

Ulama Lebak Minta Polisi Tangkap M Kece

LEBAK (IM)- Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri mendesak polisi untuk menangkap YouTuber M Kece yang diduga menistakan agama Islam. Video yang diunggahnya itu berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Semua ulama Lebak menyalkan beredarnya video Muhammad Kece melalui kanal Youtube telah menistakan agama Islam, padahal dia sebelumnya penganut Islam," kata KH Hasan Basri, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (22/8).

Menurut dia, pernyataan Kece tentu masuk kategori menistakan agama Islam, karena menuduh Nabi Muhammad SAW dikelilingi setan dan pendusta. Selain itu, juga menyatakan kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan radikalisme.

Penyampaian Muhammad Kece itu tentu menyebarkan kebencian dan penghinaan terhadap agama Islam. "Kami berharap polisi segera menangkap Muhammad Kece, karena berpotensi menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menegaskan.

Menurut dia, selama ini, pondok pesantren salafi di Indonesia, termasuk di Banten yang mengaji kitab kuning tidak ditemukannya kiai maupun santri terpapar radika-

lisme dan terorisme. Kebanyakan pesantren salafi itu dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Mereka kiai dan santri pones salafi sangat cinta Tanah Air sendiri, karena bagian dari pada keimanan.

Semestinya, kata dia, Muhammad Kece menubar kebaikan dan saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan keyakinan itu dan tidak boleh menghina juga menistakan agama Islam.

Sebab, prinsip agama Islam menjaga toleransi menjadikan kewajiban, seperti dalam Al Quran, Lakum dinukum waliyadin artinya bagimu agamamu bagiku agamaku. "Kami mengancam tindakan dan pernyataan Muhammad Kece yang intoleransi, dan aparat kepolisian harus segera menangkapnya," kata Komisi Fatwa MUI Banten itu pula.

Ia mengajak umat Islam tidak terpancing dengan pernyataan YouTuber Muhammad Kece yang menistakan agama Islam. Umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di NKRI. Di samping itu, juga menjaga sikap toleransi dengan menghormati serta menghargai di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan adat. "Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi dengan perbedaan, keragaman itu untuk saling bersatu dan melindungi serta jangan terjadi perpecahan," katanya lagi. ● pra



IDN/ANTARA

BUDIDAYA CACING LUMBRICUS RUBELLUS

Pekerja memindahkan cacing tanah jenis Lumbricus rubellus yang sudah dipanen, Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (22/8). Cacing yang digunakan untuk pakan ternak tersebut dijual dari harga Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per Kg dengan omzet per bulan mencapai Rp60 juta.

WARGA KELUHKAN BIAYA

Rumah Sakit Wajibkan Swab Antigen untuk Dampingi Istri Bersalin

Kalau enggak mau bayar swab, kita enggak bisa masuk ke rumah sakit. Disuruh nunggunya juga di area parkir. Kalau mau masuk, harus nunjukin surat swab itu, kata GN, salah seorang suami yang mendampingi istrinya bersalin.

PANDEGLANG (IM)-

Seorang warga Pandeglang, Banten berinisial GN mengeluhkan mahalnya biaya swab antigen. Pasalnya, dia harus merogoh kocek Rp 200 ribu untuk sekali tes yang digunakan demi bisa mendampingi istrinya saat menjalani persalinan di salah satu rumah sakit di wilayah tersebut.

GN bercerita peristiwa ini terjadi pada Jumat (20/8) kemarin. Saat itu, GN harus segera membawa istrinya ke rumah

sakit karena sudah mengalami kontraksi. GN yang kehidupan ekonominya tergolong masyarakat tidak mampu, akhirnya dibantu melalui program jaminan persalinan (Jampersal).

Setelah mendapatkan Jampersal, istri GN diarahkan oleh pihak puskesmas supaya dirujuk ke RS Aulia Pandeglang. Namun setelah di sana, dia kaget karena harus mengeluarkan biaya swab antigen untuk dirinya saat mau mendampingi istrinya

menjalani proses persalinan.

"Kirain saya sudah dicover semuanya sama Jampersal. Ternyata kata orang rumah sakitnya biaya swab mah enggak, harus bayar lagi," katanya sembari meminta supaya identitasnya tetap dirahasiakan, Minggu (22/8).

Awalnya GN tak mau protes dengan kebijakan tersebut. Tapi, aturan swab antigen ternyata juga berlaku bagi keluarganya, meskipun saat itu mereka datang hanya untuk melihat kehadiran sang buah hati yang baru lahir.

"Kirain kan cuma saya doang yang dites terus bayar, ternyata yang lainnya juga harus gitu (bayar swab antigen). Ya akhirnya ngalah deh, padahal malem itu ada orang tua saya, mertua, sama kakaknya istrinya saya datang ke rumah sakit. Daripada harus bayar mahal lagi, mending nunggu pas di rumah aja si dedenya dibawa pulang," ungkap GN.

"Kalau enggak mau bayar swab, kita enggak bisa masuk ke rumah sakit. Disuruh nunggunya juga di area parkir. Kalau mau masuk, harus nunjukin surat swab itu," tambahnya.

GN pun mengaku hingga hari ini masih berada di RS Aulia Pandeglang sembari menunggu kondisi istrinya membaik. Masalahnya, biaya swab antigen ini tak hanya berlaku pada saat pertama kali dia datang ke rumah sakit, tapi terus berlanjut di keesokan harinya.

"Hari Sabtu kemarin saya dites lagi, terus disuruh bayar lagi Rp 200 ribu. Kalau hari ini belum tahu ada tes lagi atau enggak, mudah-mudahan enggak ada soalnya saya bawa uang ke sini juga pas-pasan doang," ucapnya.

Hal yang sama juga dirasakan warga lainnya berinisial HR. Dia bahkan mengaku harus merogoh kocek untuk biaya swab antigen

lima anggota keluarganya ketika mendampingi sang istri melahirkan di RS Aulia Pandeglang. "Kemarin saya sampai habis sejuta setengah buat swab. Itu buat enam orang sama saya juga," katanya.

HR pun tak bisa protes atas kebijakan itu. Pasalnya ia mengaku tak bisa mengurus sang istri jika sendirian menunggu saat proses persalinan tersebut. "Enggak bisa kalau sendirian, pasti saya bingung. Untung waktu itu cuma semalem doang nginepnya, besoknya udah bisa dibawa pulang jadi enggak perlu nambah biaya lagi buat swab," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Aulia Pandeglang, Furqon Haetami, belum bisa dihubungi. Begitu juga dengan Kadinkes Pandeglang Raden Dewi Setiani, pesan singkat dan panggilan yang dikirim wartawan masih belum direspons. ● pra

Pemkot Tangerang Ajak Akademisi Sosialisasi Pentingnya Vaksinasi Covid-19

TANGERANG (IM)-

Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19. Pemkot Tangerang terus menggenjatkan program vaksinasi untuk mendorong percepatan pencapaian herd immunity.

"Saya berharap mahasiswa yang ada di Kota Tangerang membantu upaya pemerintah menyosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 di masyarakat. Informasikan kepada masyarakat kalau Covid-19 itu nyata, dan mungkin ada keluarga kita yang pernah mengalami dampaknya," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wisman-syah, kemarin.

Arief menuturkan vaksinasi yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang hingga saat ini sudah mencapai 743.371 orang untuk dosis pertama dan 438.227 orang untuk dosis kedua. Sementara pemkot, yakni 1,4 juta orang di Kota Tangerang harus divaksin.

"Bantu kami agar pandemi ini bisa cepat terselesaikan. Karena masyarakat pasti butuh penjelasan tentang apa itu vaksinasi dan seberapa pentingnya vaksin Covid-19 bagi kehidupan agar pandemi ini bisa berakhir dengan adanya penguatan imun masyarakat. Gunakan semua media untuk bantu pemerintah menyosialisasikan pentingnya vaksin," imbuh Arief.

Di sektor ekonomi, Arief juga berharap mahasiswa dan akademisi yang ada di Kota Tangerang mengambil peran untuk membantu masyarakat bangkit. Lantaran dengan bantuan saran dan kerja nyata dari mahasiswa, diharapkan akan bisa memulihkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

"Bantu mereka yang punya usaha khususnya usaha mikro dan UMKM untuk melekat teknologi, karena banyak yang belum paham tentang pemanfaatan IT," ujar Arief. ● pp



MUSRENBANG KOTA TANGSEL RESMI DIBUKA

Fokus Wujudkan Tangsel Lestari



Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie



Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid



Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo

TANGSEL (IM) -

Melanjutkan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan Musrenbang RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Jumat (20/8).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan bahwa saat ini kondisi Pandemi di Kota Tangerang Selatan mulai membaik. Dimana BOR, Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid dan Rumah Sakit Serpong Utara hingga persentase kematian menunjukkan angka yang baik.

"Vaksinasi juga, dimana saat ini sudah 44 persen masyarakat Tangsel sudah menerima vaksin," Ujar Benyamin dalam sambutannya.

Dia menambahkan bahwa dalam Musrenbang ini pihaknya mengundang pemangku kepentingan. Seperti Gubernur Provinsi Banten, Kepala Daerah Kota dan Kabupaten yang ber-

batasan dengan Kota Tangsel. Seperti Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Depok.

Perumusan rencana kerja ini juga nantinya akan membahas soal upaya pemerintah dalam mewujudkan Tangsel sebagai Kota Lestari. Dimana meliputi delapan indeks dan cakupan yang sudah dibahas dan ditetapkan.

Adapun delapan indeks dan cakupan itu adalah, Indeks Lingkungan Hidup, Indeks Layak Hidup, Cakupan Pengurangan Kawasan Kumuh, Cakupan Pengelolaan Sampah, Cakupan Rumah Tidak Layak Huni, Indeks Risiko Ruang Terbuka Hijau, Indeks Risiko Bencana, Indeks Rasa Aman dan Indeks Demokrasi.

Dengan memperhatikan indeks-indeks tersebut, diharapkan bisa membuat Tangsel Lestari. Sebagaimana digambarkan oleh Benyamin sebelumnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Abdul Rasyid menjelaskan bahwa



akibat pandemi ada beberapa pekerjaan yang terpaksa ditunda pelaksanaannya, salah satunya adalah Musrenbang ini. Namun karena kemajuan teknologi, akhirnya pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan cara daring.

"Karena itu juga saya ingin memberikan apresiasi kepada

pemerintah selaku pelaksana dari Musrenbang ini," Ujar Rasyid dalam acara yang sama.

Untuk Musrenbang yang dilakukan, Rasyid menyampaikan jika pelaksanaannya harus meliputi lima sektor penting pembangunan, yaitu pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan

dan infrastruktur.

Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat kemiskinan daerah, dimana tahun ini diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Tangsel naik secara signifikan.

"Pembentukan RPJMD menentukan kebijakan yang akan diciptakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga harus dibuat dengan maksimal dan mengikutsertakan masyarakat," Ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini dilakukan secara daring untuk mencegah penularan Covid-19 dengan mengundang stakeholder yang diharapkan bisa memberikan saran untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam waktu lima tahun ke depan. (Adv)